

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jepang Pakis

1. Letak Geografis

Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 14 Desa di Kecamatan Jati yang mempunyai jarak 5 km dari kota Kabupaten. Luas wilayah Desa Jepang Pakis adalah 778,641 ha/m² terdiri dari 3 dusun 7 RW dan 40 RT.

Adapun secara geografis batas-batas wilayah Desa Jepang Pakis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kelurahan Mlati Kidul
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jepang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gulang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Loram Wetan

Secara topografis Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian kurang lebih 3,5 m diatas permukaan air laut. Dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, sawah dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong.¹

2. Keadaan Sosial Budaya Desa

Adapun jumlah Kepala Keluarga di Desa Jepang Pakis sebanyak 7.268 jiwa yang terbagi 3.515 Kepala Keluarga. Jika dilihat dari luasnya wilayah, maka Desa Jepang Pakis merupakan daerah yang terlalu padat penduduknya. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

¹ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**Tahun 2013-2019**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	370	357	727
5-9	368	361	729
10-14	367	359	726
15-19	366	362	728
20-24	369	356	725
25-29	369	360	729
30-39	368	360	728
40-49	368	362	730
50-59	364	363	727
60+	350	369	719
Jumlah	3.659	3.609	7.268

3. Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari pendidikannya, masyarakat Desa Jepang Pakis bisa dikatakan maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, juga didukung sarana

pendidikan yang cukup memadai. Tingkat pendidikan dan sarana pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :²

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat tahun Tahun 2013-2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Perguruan Tinggi	427 Orang
2.	S3	5 Orang
3.	S2	33 Orang
4.	S1	294 Orang
5.	Akademi	953 Orang
6.	SMU/SMK/MAN	3.116 Orang
7.	SLTP/MTS	1.907 Orang
8.	SD/MI	468 Orang
9.	Belum Tamat SD	116 Orang
10.	Tidak Tamat SD	29 Orang
11.	Tidak Sekolah	5 Orang ³

² Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

³ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

Tabel 4.3

Sarana Pendidikan Formal tahun Tahun 2013-2019

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Play Group	3 buah
2.	Taman Kanak-kanak	3 buah
3.	Sekolah Dasar/ Sederajat	4 buah

Tabel 4.4

Sarana Pendidikan Non Formal tahun Tahun 2013-2019

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Al-qur'an	3 buah
2.	Madrasah Diniyah	2 buah

4. Kondisi Perekonomian Desa

Desa Jepang Pakis sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Jati dimana merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Kudus, maka mata pencaharian warga masyarakat adalah mayoritas sebagai petani. Dengan demikian bidang pertanian merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa. Adapun mata pencaharian masyarakat desa jepang pakis secara rinci sebagai berikut.⁴

:

⁴ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

Tabel 4.5

Mata Pencaharian tahun Tahun 2013-2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang
1.	Petani	364 Orang
2.	Buruh Tani	152 Orang
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	98 Orang
5.	Buruh industri	2.247 Orang
6.	Buruh bangunan	152 Orang
7.	Pedagang	119 Orang
8.	Pengangkutan	82 Orang
9.	Pegawai Negeri	196 Orang
10.	Pensiunan	47 Orang
11.	Lain-lain	162 Orang

Luas lahan pertanian di Desa Jepang Pakis seluas 50 Ha, dan setiap tahunnya menghasilkan produksi beras rata-rata 4 ton/Ha. Adapun tanaman utama di Jepang Pakis adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

Tabel 4.6
Hasil Pertanian tahun Tahun 2013-2019

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanaman Akhir Bulan (Ha)	Luas yang di panen (Ha)	Rata-rata produksi Kw/Ha	Jumlah Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Padi	635,671	50	5.600	565
2.	Jagung	-	-	-	-
3.	Ketela Pohon	1	1		
4.	Ketela Rambat	1	1		
5.	Kacang Tanah	1	1		
6.	Kedele	4	4	28.000	20.000
7.	Sayur-sayuran	-	-		
8.	Buah-buahan	1	1		

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Jepang Pakis adalah memeluk Agama Islam . jumlah pemeluk agama di desa Jepang Pakis sebagai berikut :

Tabel 4.7
Agama tahun Tahun 2013-2019

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	7.016 Orang
2.	Kristen Katholik	176 Orang
3.	Kristen Protestan	75 Orang
4.	Budha	3 Orang
5.	Hindu	-
6.	Lain-lain	-

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Jepang Pakis terdiri dari 3 dusun 7 RW dan 40 RT, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), lima orang kaur dan dua Kepala Dusun (Kadus) mempunyai jumlah penduduk 7.268 orang yang terdiri dari 3.659 orang laki-laki dan 3.609 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 436 Rumah Tangga Miskin.

Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan/manfaat lembaga-lembaga di Desa bagi masyarakat. Sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan/manfaat lembaga-lembaga di Desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasil kajian kalender musim adalah masyarakat dapat merumuskan masalah dan potensi yang dimiliki Desa.⁶

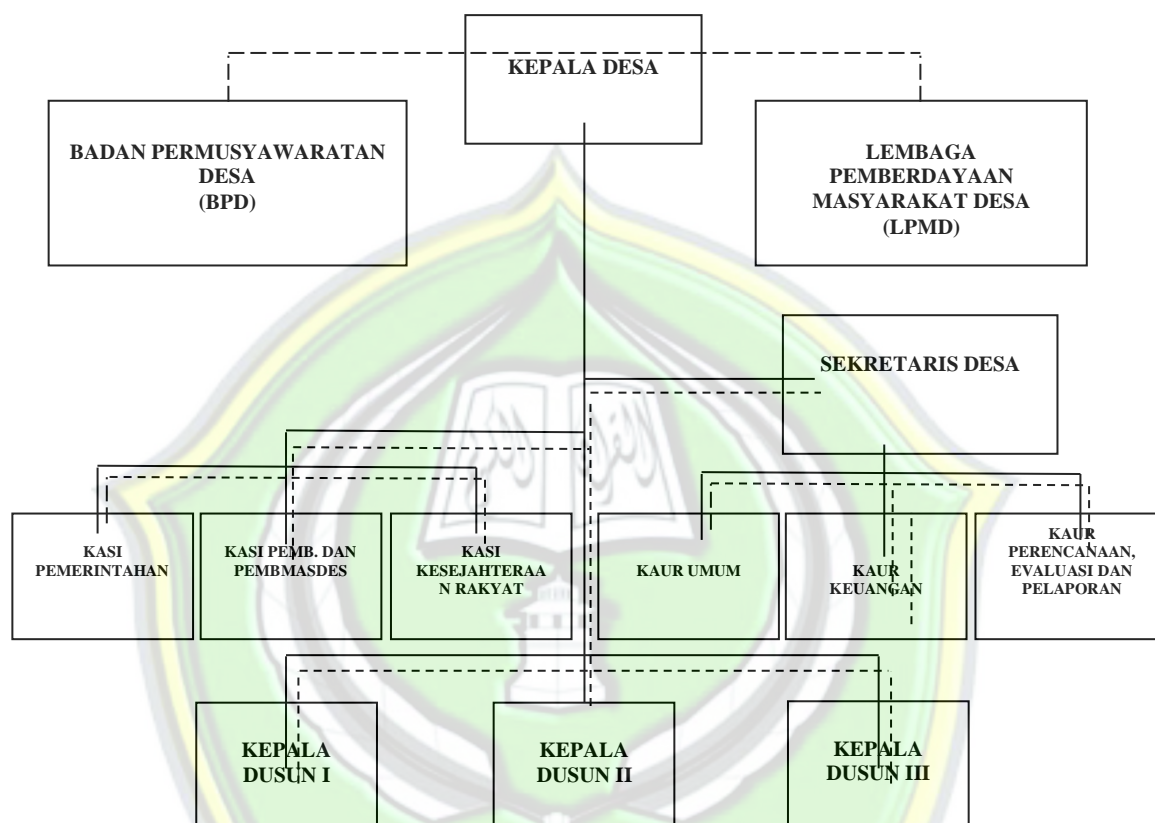
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Jepang Pakis dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.⁷

⁶ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

⁷ Dokumentasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus, dikutip tanggal 27 Desember 2016

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Jepang Pakis Jati Kudus



B. Deskripsi Data

1. Data tentang Kriteria Penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal. Untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga

(K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁸

Pelaksanaan pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hal penting yang tidak bisa dilupakan yaitu pemilihan kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini adalah penerima manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu kelompok yang keadaan ekonomi keluarganya berada digaris kemiskinan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarganya.

Kehidupan untuk daerah Desa, taraf kehidupan masyarakat dalam satu lingkungan hampir sama. Karena mayoritas dari mereka memiliki pekerjaan yang sama hanya saja untuk penghasilan terjadi perbedaan, sehingga terlihatlah masyarakat mana yang bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya dan masyarakat mana yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga berada ditaraf kemiskinan.

Berdasarkan wawancara dengan koordinasi pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bapak Kaswadi mengatakan:

“kriteria penerima beras miskin diantaranya kondisi rumah yang tidak maupun kurang layak, tembok masih merah (abangan), lantai masih tanah, pendidikannya rendah seperti lulusan smp, pekerjaan yang tidak menetap atau serabutan yang pendapatannya dibawah UMR kudas, dan yang tidak mampu untuk bekerja lagi seperti para orang tua lanjut usia yang kesehatannya kurang baik (sakit-sakitan)”.⁹

Dari hasil wawancara diketahui bahwa kriteria penerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus diantaranya yaitu dilihat dari kondisi rumah yang tidak atau kurang layak, kondisi lantai dibawah standar, dinding maupun atap yang masih biasa. Selain itu dilihat dari tingkat pendidikannya yang tidak lulusan dari pendidikan tinggi dengan kata lain maksimal dari lulusan

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin 2015*, hal. 1

⁹ Wawancara dengan Kaswadi selaku Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 5 Januari 2017, jam 10.20 WIB.

SMP, status pekerjaan yang tidak menetap sehingga pendapatannya pun tidak tentu yaitu pendapatan dibawah UMR (Upah Minimum Regional) Kudus maupun yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Selain Kriteria diatas, Orang tua lanjut usia yang kesehatannya kurang baik (sering sakit-sakitan) juga menerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kesra pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bapak Rifqi mengatakan:

“Ada sebanyak 437 warga penerima manfaat subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Jepang Pakis yang meliputi keluarga kurang mampu, rentan, dan tidak mampu. Semua penerima manfaat tersebut sesuai dengan data DPM-1 dari kelurahan atau desa”¹⁰

Menurut Kasi Kesra pemerintahan di desa Jepang Pakis ada sebanyak 437 warga penerima manfaat subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang meliputi dari keluarga kurang mampu, rentan dan tidak mampu. Semua penerima manfaat tersebut sesuai dengan data DPM-1 dari kelurahan atau desa. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa atau kelurahan yang menjadi dasar penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa atau kelurahan.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bapak Kaswadi mengatakan:

“Tujuan dari adanya program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah untuk menyejahterakan warga masyarakat miskin dalam kebutuhan pokok makanan sehari-hari, khususnya yang ada di Desa Jepang Pakis sendiri”.¹¹

Tujuan dari adanya program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran

¹⁰ Wawancara dengan Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 09.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Kaswadi selaku Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 5 Januari 2017, jam 10.20 WIB

rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan menyejahterakan warga masyarakat miskin dalam kebutuhan pokok makanan sehari-hari, khususnya yang ada di Desa Jepang Pakis sendiri.

2. Data tentang Peran Aparat Desa berkaitan dengan Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Seorang pelaksana program harus mengerti cara ataupun tahapan yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan program, karena dengan begitu pelaksana akan lebih mudah menggambarkan proses pelaksanaan distribusi.

Berdasarkan wawancara dengan Kaur koordinasi pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Bapak Rifqi mengatakan:

“Dalam pembagian beras miskin, kepala desa membentuk Tim koordinasi beras miskin yang mengurus beras miskin mulai dari pendataan nama sasaran, pembagian manfaat, hingga penyelesaian administrasi”.¹²

Seperti dalam penelitian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ini, peneliti mendapatkan gambaran pelaksana pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus ternyata dalam pelaksanaan pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus, Kepala Desa telah memberikan wewenang pada bawahannya yaitu bagian Kasi Kesra dan koordinator untuk mengurus pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mulai dari pendataan nama sasaran, pembagian manfaat serta dalam penyelesaian administrasinya.

¹² Wawancara dengan Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 09.30 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Kaur koordinasi pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Bapak Rifqi mengatakan:

“Untuk menentukan nama-nama sasaran kami selaku kaur koordinasi dan koordinasi bekerjasama dengan seluruh RT se-Jepang Pakis. Dengan tujuan agar penentuan nama sasaran rumah tangga penerima manfaat bisa tersalurkan dengan tepat. Karena yang lebih mengetahui keadaan warga adalah RT setempat. Jika sudah didata pihak Tim Koordinasi menganalisisnya”.¹³

Penentuan rumah tangga sasaran penerima manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan kaur koordinasi dan koordinasi bekerjasama dengan seluruh RT se-Jepang Pakis. Dengan tujuan agar penentuan nama sasaran rumah tangga penerima manfaat bisa tersalurkan dengan tepat. Dengan alasan yang lebih mengetahui keadaan warga adalah RT setempat. selanjutnya data tersebut dianalisis oleh pihak Tim Koordinasi yaitu selaku kaur Koordinasi dan koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Bapak Kaswadi mengatakan:¹⁴

“Sosialisasi program beras miskin kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Jepang Pakis dengan ketua tiap-tiap RT”.

Sosialisasi program beras miskin kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Jepang Pakis yang membahas tentang masalah beras miskin, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah ketua RT antara kepala desa, tim koordinasi beras miskin, dan ketua tiap-tiap RT

¹³ Wawancara dengan Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 09.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Kaswadi selaku Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 10.20 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kaswadi mengatakan:

“Pelaksanaan pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah selalu tepat waktu dengan jadwal yang telah ditentukan”.¹⁵

Pada saat pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah tepat waktu sehingga rumah tangga penerima manfaat dapat terus menikmati Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengatakan:

“Hampir setiap bulannya staf dari Kelurahan memberitahukan kepada Ketua RT tentang alokasi beras miskin yang ada di Desa Jepang Pakis, yang kemudian memberitahukan kepada setiap masyarakat miskin untuk segera mengambil jatah beras mereka di Balai Desa.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengatakan:

“Setiap bulannya kami selalu mengumpulkan hasil dari penjualan beras Raskin yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Kecamatan dan disetorkan ke Perum BULOG sebagai biaya kompensasi beras Raskin yang mereka salurkan kepada seluruh warga yang menerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Desa Jepang Pakis Jati Kudus”.¹⁷

Adapun hasil dari penjualan beras kepada RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dikumpulkan dan disimpan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kelurahan yang selanjutnya melalui Kepala Kelurahan

¹⁵ Wawancara dengan Kaswadi selaku Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 10.20 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 09.30 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Rifqi selaku Kaur Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 09.30 WIB.

menyetorkan Harga Penjualan Beras Raskin kepada pihak Kecamatan yang selanjutnya mengumpulkan uang hasil pembelian beras Raskin dari setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan dan akhirnya akan diserahkan kepada Perum BULOG sebagai Kompensasi terhadap harga beras tersebut ke BULOG.

Dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan pasti ada hambatan dan kendala yang dihadapi, karena suatu kebijakan akan sulit atau bahkan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar pasti akan ditemukan kesalahan, kekeliruan dan kurangnya respon dari pihak yang menerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaswadi koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mengatakan:

”kendala dalam pembagian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah warga yang dalam kriteria mampu beranggapan bahwa mereka berhak menerima Raskin karena mereka dan penerima Raskin memiliki kehidupan yang sama”.¹⁸

Salah satu kendala dalam pembagian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang paling sensitif adalah masyarakat di lingkungan si miskin atau penerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka akan selalu beranggapan bahwa diantara dia dan si miskin memiliki kehidupan yang sama, sehingga masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa dia tergolong masyarakat yang mampu. Hal ini sangat menyulitkan pelaksana subsidi raskin karena di daerah pedesaan rasa kekeluargaan masih kuat sehingga kesadaran dari masyarakat sendiri kurang.

3. Data tentang Ketepatan Sasaran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Suatu program akan berhasil jika dari program itu sendiri jelas memaparkan manfaat apakah yang diterima oleh kelompok sasaran dari program tersebut. Program yang baik tentunya akan memberikan manfaat

¹⁸ Wawancara dengan Kaswadi selaku Koordinator Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 12 Januari 2017, jam 17.00 WIB

dan bukan hanya formalitas ataupun simbolis saja. Dalam hal ini, pembagian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bisa terlihat jelas manfaat yang akan diterima oleh Rumah Tangga Miskin adalah bantuan beras. Dimana bantuan ini dinilai dapat membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Apalagi beras adalah kebutuhan pokok sebagai penunjang kondisi tubuh yang sehat untuk bisa bekerja atau beraktifitas.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tergolong Kurang mampu, ibu pasini mengatakan:

“Selama mendapatkan beras miskin dari pemerintah saya merasa cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saya masih bekerja menjadi buruh di pabrik sehingga saya tidak hanya mengandalkan beras miskin saja dalam memenuhi kebutuhan beras dalam keluarga. Seringkali yang saya dapatkan adalah kualitas beras yang kurang layak untuk dikonsumsi. Banyak kutu, ada kerikilnya dan berasnya bau”.¹⁹

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Rumah Tangga Penerima Manfaat subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari golongan kurang mampu merasakan bahwa dengan bantuan beras yang diperoleh sudah cukup membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari penerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak hanya mengandalkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah saja dalam memenuhi kebutuhan beras dalam keluarga. Setiap kelompok sasaran memiliki pekerjaan masing-masing seperti buruh di PT Djarum, petani, dan pekerja serabutan walaupun penghasilannya tidak besar tetapi bisa untuk sedikit membantu perekonomian mereka sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tergolong Rentan, bapak Nor Sholeh mengatakan:

¹⁹ Wawancara dengan Pasini selaku Penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 22 Januari 2017, jam 14.00 WIB.

“Saya merasa terbantu dengan adanya Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pemerintah dan mengandalkan beras miskin, karena sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Mengingat pekerjaan saya yang serabutan, meskipun kualitas beras yang didapatkan kurang layak konsumsi namun saya biasanya menukarkannya kepada agen agar mendapatkan beras yang layak untuk di konsumsi”²⁰.

Berdasarkan wawancara tersebut telah diketahui bahwa penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari golongan Rentan tidak serta merta menggunakan beras dari pemerintah dengan alasan bahwa beras yang diberikan kurang layak di konsumsi dan di tukarkan kepada agen beras dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tergolong Tidak Mampu, bapak Rif’an mengatakan:

“Saya merasa sangat terbantu adanya Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan saya sangat mengandalkan beras miskin yang harganya begitu murah, karena dapat mengurangi beban pengeluaran keperluan rumah tangga. Apalagi pendapatan saya tidak tentu yang bekerja sebagai tukang becak sehari-harinya.”²¹

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tergolong Tidak Mampu merasa sangat terbantu karena dapat mengurangi pengeluaran keperluan rumah tangganya yang berprofesi sebagai tukang becak.

C. Pembahasan

1. Kriteria Penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Melihat dari data-data yang ada dalam lapangan dapat peneliti analisis bahwa dalam mekanisme pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa Jepang Pakis Jati Kudus, sebanyak 437 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat beras miskin.

²⁰ Wawancara dengan Nor Sholeh selaku Penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 22 Januari 2017, jam 13.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Rif’an selaku Penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa Jepang Pakis Jati Kudus, tanggal 22 Januari 2017, jam 15.00 WIB.

Tidak semua warga mendapatkan manfaat subsidi beras miskin. Dalam pembagian beras miskin ada beberapa kriteria penentuan untuk penerima beras miskin. Dengan tujuan agar pembagian beras miskin tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Dari hasil wawancara dengan koordinasi pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bapak Kaswadi diketahui bahwa Kriteria penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus diantaranya yaitu dilihat dari kondisi rumah yang tidak atau kurang layak, kondisi lantai dibawah standar, dinding maupun atap yang masih biasa. Selain itu juga dilihat dari tingkat pendidikannya tidak lulusan dari pendidikan tinggi dengan kata lain maksimal dari lulusan SMP, status pekerjaan yang tidak menetap sehingga pendapatannyapun tidak tentu yaitu pendapatan dibawah UMR Kudus maupun yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Selain Kriteria diatas, orang tua lanjut usia yang kesehatannya kurang baik (sering sakit-sakitan) juga menerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Hal ini kurang sesuai dengan Penentuan Kriteria Kemiskinan menurut Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk Kriteria penerima subsidi beras miskin diantaranya:

- a) Luas lantai bangunan tempat kurang dari 8 m² per orang.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- c) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai.
- g) Bahan bakar untu memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, dan hanya SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti sepeda motor (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya.²²

Setiap individu berhak atas penghidupan di suatu negara, dan setiap warga memiliki jaminan atas kebutuhan pokoknya. Sesungguhnya tugas dan tanggung jawab utama negara untuk mengawasi setiap warga memperoleh kebutuhan pokoknya menurut prinsip “Hak Atas Penghidupan” dan dalam hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok seluruh warganya dalam kedudukan yang sederajat. Berdasarkan prinsip di negara Islam, Departemen Jaminan Sosial memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada seluruh warganya yang sakit, tua, miskin, kekurangan, pengangguran atau cacat serta yang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan.²³ Sehingga negara wajib menjamin penghidupan atas warga negaranya.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.a.w bersabda, “Sayalah berdasarkan kitab suci Allah yang paling dekat dengan orang-orang beriman, maka siapapun diantara kamu meninggal dalam keadaan

²²<http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/38.%2031012013%20Paparan%20Skr.%20Eksekutif%20TNP2K%20pada%20Deputi%20Seskab%20%20Basis%20Data%20Terpadu.pdf> diakses pada tanggal 4-januari-2017, pukul 12.45 WIB.

²³ *Ibid.*, hlm. 315

berhutang atau meninggalkan anak yang harus disantuni, kalian harus memanggilku untuk meminta bantuan, karena Akulah yang menjaga mereka. Dan Siapapun di antara kalian yang meninggalkan harta, itu diperuntukkan bagi ahli warisnya siapapun dia.”

Hadis ini memberikan penjelasan yang jelas akan tanggung jawab suatu negara terhadap rakyatnya yang miskin. Tugas negara adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperhatikan bahwa rakyatnya tidak menderita kelaparan dan kekurangan, melunaskan hutang mereka jika memang mereka tidak mampu mengembalikannya, merawat sebagaimana mestinya terhadap keluarga miskin yang tertimpa kematian. Negara tidak boleh melantarkan rakyatnya yang tertimpa kemalangan. Negara mempunyai tanggung jawab khusus terhadap mereka yang harus dirawat dengan penuh semangat.²⁴ Sehingga warga negara dapat hidup dengan kebutuhan ekonomi yang tercukupi.

Islam berupaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Menurut Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi, Al-Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. Jadi di sini kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjembatani berbagai aspek kesenjangan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi, bahwa sarana yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah bekerja, jaminan dari keluarga dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, kewajiban material tambahan selain zakat, sumbangan sukarela dan kesadaran individual.²⁵

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2003, hlm. 314-315

²⁵ Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 131

2. Peran Aparat Desa berkaitan dengan Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Kepala desa/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut:

1) Kedudukan

Pelaksanaan distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa setingkat.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran harga tebus beras, dan menyelesaikan administrasi.

3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan penolakan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di titik distribusi. Untuk desa/kelurahan pemerintahan setingkat yang titik distribusinya tidak berada di desa/kelurahan pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi.
- c. Penerimaan harga tebus raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apalagi tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi.
- e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kecamatan.²⁶

Sebagaimana pembagian subsidi beras miskin yang ada di Desa Jepang Pakis, Kepala Desa membentuk Tim Koordinasi Pembagian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang bertujuan agar dalam pelaksanaan pembagian tersebut berjalan dengan baik.

Adapun peran dari aparat desa dalam pembagian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yaitu:

1. Menandatangani Berita Acara Serah Terima di Titik Distribusi.
2. Melakukan pendataan calon nama penerima manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus. Tim koordinasi Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bekerjasama dengan seluruh RT se-Jepang Pakis. Dengan tujuan agar penentuan nama sasaran rumah tangga penerima manfaat dapat terbagikan dengan tepat. Karena yang lebih mengetahui keadaan warga adalah RT (Rukun Tetangga) setempat. Selanjutnya Tim Koordinasi Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menganalisis apakah nama yang tercantum tersebut berhak mendapatkan atau tidak.
3. Tim Koordinasi Pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah memberikan kupon atau surat pemberitahuan pengambilan beras miskin yang bertempat di Balai Desa Jepang Pakis

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*, hal. 23-24

Jati Kudus. Jadwal pengambilan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah telah diatur di setiap RT-nya dengan tujuan agar pelaksanaan pembagian dapat terlaksana dengan baik.

4. Penerimaan Harga Tebus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebesar Rp. 24.000/15 Kg dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Keaktifan serta fungsi dari Tim Koordinasi Raskin di Desa Jepang Pakis dalam hal sosialisasi beras Raskin sangat disambut baik oleh masyarakat dikarenakan dalam hal pelayanan serta informasi sangat mudah di alami dan di ketahui oleh masyarakat. Dan juga Mengingat jadwal pengambilan beras Raskin yang ada di Desa Jepang Pakis di atur tidak bersamaan setiap RT-nya sehingga masyarakat tidak perlu antri atau berdesak-desakan dalam mengambil jatah beras Raskin mereka di Balai Desa. Tetapi meskipun sudah diatur seperti itu, tidak berarti berjalan dengan sangat baik. Karena kurangnya pengawasan dari Tim Koordinasi beras miskin terkadang ada kecurangan dari penerima manfaat beras miskin yang mengambil lebih dari jatah beras miskin yang telah di tentukan.

3. Ketepatan Sasaran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Menurut Edwin G. Dolan ada tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (*standard of living*). Standar hidup ini tentunya perlu di tetapkan secara objektif.

- b. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.
- c. Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.

Namun yang lebih umum, kemiskinan dibagi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (*absolute provetry*) dan kemiskinan relatif (*relative provetry*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau *poverty line*. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat atau di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.

Menurut pandangan Islam, para ahli fikih dan tafsir juga berbeda pendapat tentang definisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang sama, yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sebagian ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mampu memenuhi secara penuh.²⁷

Begitu juga dengan di Desa Jepang Pais Jati Kudus banyak masyarakat yang tergolong miskin yaitu tidak tercukupya pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga mendapatkan beras miskin dari pemerintah. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Rumah Tangga

²⁷ Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 123-125

Penerima Manfaat Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari golongan mampu merasakan bahwa dengan bantuan beras yang diperoleh sudah cukup membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari penerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak hanya mengandalkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah saja dalam memenuhi kebutuhan beras dalam keluarga. Berbeda dengan penerima beras miskin dari golongan rentan, tidak serta merta menggunakan beras dari pemerintah dengan alasan bahwa beras yang diberikan kurang layak di konsumsi dan di tukarkan kepada agen beras dengan kualitas yang baik. Sedangkan dari penerima beras miskin dari golongan tidak mampu merasa sangat terbantu karena dapat mengurangi pengeluaran keperluan rumah tangganya yang berprofesi sebagai tukang becak. Dari data tersebut dapat dilihat adanya perbedaan ukuran kemiskinan di setiap penerima Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Jepang Pakis Jati Kudus.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Menurut Didin penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera (lahir batin) dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dari kekufuran, kemusyrikan, kelaparan, dan rasa takut. Sasaran yang ingin dicapai tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas. Islam dari awal sudah mengamanahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk berupaya secara aktif mengatasi kemiskinan.²⁸

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil tidaklah mudah, apalagi dalam pembagian subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah yang rentan terhadap kesalahan maupun ketidaktepatan dalam bagiannya. Begitupun di Desa Jepang Pakis, masih ditemukan kurang tepatnya penerima sasaran subsidi Beras bagi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 131

masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu dilihat dari beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut:

- a. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran beras miskin yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima beras miskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima beras miskin. Adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran itu adalah:
 - 1) Dari pihak Pemerintah Desa Jepang Pakis Jati Kudus kadangkala tidak jeli dalam melihat atau mendata masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat beras miskin, sehingga sering terjadi kesalahan ada kalanya masyarakat yang tidak tergolong miskin juga ikut menikmati beras Raskin tersebut.
 - 2) Data penerima beras miskin yang digunakan di Desa Jepang Pakis Jati Kudus adalah data yang di keluarkan dari pihak per RT. Dimana sering terjadi manipulasi data. Yang tidak tergolong miskin mendapatkan beras miskin dengan alasan sebagai imbalan yang telah memberikan surat pemberitahuan untuk pengambilan beras miskin. Tentu saja merugikan keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan beras miskin tersebut.
 - 3) Tim Koordinasi yang bertugas mendaftarkan rumah tangga miskin kadang kala menggunakan mekanisme random atau hanya melihat dari segi fisik masyarakat tersebut seperti kondisi rumah, harta benda, bahkan kendaraan padahal indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan persepsi tentang kemiskinan.
 - 4) Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan jumlah penerima beras miskin tidak balance, yaitu selisih satu Orang.

- b. Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses pembagian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dikarenakan kurang peduli dan sudah terlalu percaya bahwa pembagian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah tepat sasaran, padahal banyak masyarakat desa yang protes karena belum menerima beras miskin tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak mewujudkan keadilan yang merata kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu peran seluruh aparat Pemerintah Kelurahan dan instansi yang terkait dalam proses pembagian beras miskin harus lebih di optimalkan.

Menurut Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan Allah. Rasul bersabda: “Tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang ‘ajam”. Firman Allah menyatakan:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S Al-Maidah/5:8).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
اَنْفُسِكُمْ ۗ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا ۙ اَوْ فَقِيْرًا ۙ فَاللّٰهُ اَوْلٰى
بِهَمَا ... ﴿١٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.(An-Nisa(4):135).

Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, maupun warna kulit. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh harta meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda.²⁹ Dalam hal ini Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.³⁰

²⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 88

³⁰ *Ibid.*, 89